

Strategi Pendamping PKH dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Keberhasilan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pasaman Barat

Siska Rina¹, Nora Eka Putri², Lince Magriasti³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: siskarina8782@gmail.com

Abstract

The Family Hope Program (PKH) frequently focuses heavily on basic administrative compliance, thereby sidelining its long-term economic empowerment goals through local potential mobilization. This study aims to analyze the strategies of PKH facilitators in utilizing local resources to optimize the economic independence of Beneficiary Families (KPM) in West Pasaman Regency. A descriptive qualitative approach was employed using purposive sampling with 8 key informants, and data were analyzed through a qualitative SWOT comparison matrix. The field findings indicate that although facilitators possess strong geographical proximity and leverage through Family Development Sessions (P2K2), their roles are constrained by a high administrative workload and a lack of entrepreneurial competence. Consequently, economic guidance remains limited to normative motivation, and local commodities (such as corn) are still sold cheaply to middlemen. Based on the SWOT analysis, concrete strategic interventions are formulated: (1) reforming P2K2 materials to focus on practical processing of regional commodities (corn and palm oil); (2) optimizing integration with productive inclusion programs from the central government; and (3) fostering cross-sectoral program synchronization between the Department of Social Affairs and the Department of Cooperatives and MSMEs to resolve capital and work tool constraints for KPM business groups.

Keywords: PKH Facilitators, Local Resources, Economic Empowerment, SWOT Analysis, Public Policy



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang layak. Menurut (Mansur et al., 2024), kemiskinan

diartikan sebagai ketidakmampuan pemenuhan dalam lingkup ekonomi yang menyangkut pada pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari warga di suatu wilayah tertentu, yang dicirikan dengan tidak mencukupinya penghasilan sehari-hari untuk menutupi keperluan dasar.

Pemerintah Indonesia merespons masalah tersebut melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial, salah satunya program bantuan bersyarat yang diarahkan untuk mendorong kualitas hidup masyarakat miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemberian bantuan sosial bersyarat dengan sasaran keluarga maupun seseorang yang miskin dan rentan. Keluarga atau seseorang tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sekarang dikenal dengan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

PKH memiliki dua tujuan utama. Secara kuantitatif, PKH dirancang untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia, dan banyak penelitian telah menunjukkan hasil positif dari program ini (Bank, 2020). Secara kualitatif, PKH bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencegah gizi buruk, serta mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk terus bersekolah (Indonesia, 2018). Selain itu, PKH juga membantu keluarga miskin agar lebih mudah mengakses layanan dasar seperti pangan, gizi, dan pendampingan sosial. Program ini juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia, sejalan dengan perlindungan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi dan kebijakan nasional (Yuda & Pholpark, 2022). Dengan tujuan yang luas, kebijakan PKH bukan hanya bantuan uang, tetapi strategi sosial yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat miskin.

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan, tetapi juga diarahkan sebagai program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mencapai kemandirian dan graduasi secara bertahap. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli adalah “upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan” (Sudarmanto et al., 2024). Namun dalam implementasinya, terdapat tantangan besar yang membuat tujuan pemberdayaan tersebut belum tercapai optimal. Sebagai contoh, dalam kajian internasional muncul kekhawatiran bahwa bantuan sosial dapat memunculkan sindrom ketergantungan yang menghambat kemandirian penerima bantuan (Shepherd et al., 2011). Tantangan ini diperparah oleh data penerima yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi terkini dan pelaksanaan Family Development Session (P2K2) yang belum optimal. Fenomena kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi ini membutuhkan kajian mendalam terutama terkait pemanfaatan sumber daya lokal sebagai strategi pemberdayaan berkelanjutan (Garini, 2023).

Kabupaten Pasaman Barat memiliki profil kesejahteraan yang menjadi latar empiris penting; tingkat kemiskinan pada level kabupaten tercatat di kisaran sekitar 7 persen pada tahun 2024, menandakan bahwa masih terdapat basis rumah tangga rawan ekonomi yang menjadi target intervensi PKH. Kondisi

demografis dan struktur mata pencaharian yang didominasi sektor pertanian membuka peluang pemanfaatan sumber daya lokal seperti produk pertanian, agroindustri skala mikro, dan potensi kearifan lokal untuk pemberdayaan ekonomi KPM. Namun implementasi pemanfaatan sumber daya lokal oleh pendamping PKH belum banyak dilaporkan secara sistematis di wilayah ini sehingga perlu ditelaah langkah-langkah praktis, hambatan, dan keberlanjutan strateginya. Dengan demikian studi ini menempati celah penelitian yang relevan untuk kebijakan lokal dan praktik pendampingan BPS Pasaman Barat 2024 (Barat, 2024).

Literatur evaluatif pada kebijakan PKH di berbagai daerah menunjukkan pola umum: keberhasilan dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga pada sisi konsumsi tetapi munculnya kecenderungan penggunaan bantuan untuk kebutuhan konsumtif serta relatif terbatasnya dampak pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Penelitian empiris ini menyoroti fungsi pendamping sosial sebagai fasilitator perubahan perilaku, penghubung layanan, dan agen pemberdayaan namun kapasitas, beban kerja, dan dukungan institusional terhadap pendamping seringkali variatif (Nandini, 2022)(Munandar, 2019). Dalam konteks tersebut, pemanfaatan sumber daya lokal oleh pendamping bisa menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan bantuan dan memperkuat kemandirian KPM, asalkan didukung oleh pemetaan sumber daya daerah, pelatihan kewirausahaan, akses pasar, dan jaringan kelembagaan.

Dari perspektif teori pemberdayaan dan kebijakan publik, pemanfaatan sumber daya lokal (*local resource mobilization*) dipahami sebagai proses mengidentifikasi, mengorganisir, dan memanfaatkan aset lokal (material, manusia, sosial) untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Chambers, 1997); (Sen, 2014). Dalam implementasi kebijakan sosial seperti PKH, fungsi pendamping bukan hanya distribusi manfaat tetapi juga fasilitasi aksi kolektif, transfer pengetahuan, dan akses ke jaringan pasar atau institusi keuangan mikro. Ketidaksesuaian antara kapasitas pendamping dan tuntutan fungsionalnya dapat menghambat transformasi aset lokal menjadi peluang ekonomi produktif bagi KPM. Dengan demikian riset ini menggabungkan kerangka teoritis pemberdayaan komunitas dengan analisis implementasi kebijakan guna menilai efektivitas upaya pendamping dalam memobilisasi sumber daya lokal.

Secara kontekstual, Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi sumber daya alam dan kultural yang relevan: komoditas pertanian dan perkebunan (kopi, jagung, dan kelapa sawit), keahlian pengolahan pangan tradisional, serta modal sosial komunitas pedesaan yang dapat diorganisasi menjadi kegiatan produktif. Namun adanya hambatan seperti akses pasar terbatas, permodalan kecil, keterbatasan keterampilan manajerial KPM, dan infrastruktur yang kurang mendukung, menjadi tantangan nyata dalam memanfaatkan potensi tersebut. Pendamping PKH, jika diberdayakan dengan pelatihan teknis, keterampilan kewirausahaan, dan jaringan kemitraan, memiliki peran strategis mengubah potensi lokal menjadi sumber penghidupan berkelanjutan.

Kerangka ideal normatif vs kenyataan empiris berguna untuk menganalisis jarak antara tujuan kebijakan PKH yang menekankan kemandirian dan pengurangan kemiskinan melalui bantuan bersyarat dan pembinaan, dengan realitas pelaksanaannya yang dihadapkan pada berbagai kendala teknis, institusional, dan kultural. Pendekatan ini membantu menempatkan peran pendamping bukan hanya sebagai pelaksana operasional tetapi juga sebagai mediator normatif yang berupaya merekonsiliasi tuntutan kebijakan dengan kenyataan sosial lokal. Dengan memetakan gap ini penelitian dapat merekomendasikan intervensi kebijakan dan praktik pendampingan yang lebih realistis dan kontekstual. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang "Strategi Pendamping PKH dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Kesuksesan Kebijakan PKH di Kabupaten Pasaman Barat".

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis upaya pendamping PKH dalam pemanfaatan sumber daya lokal di Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami proses, strategi, persepsi, dan hambatan yang bersifat kontekstual. Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan memfokuskan pada area yang memiliki karakteristik *urban* (perkotaan/pusat pemerintahan) dan *rural* (pedesaan dengan basis pertanian kuat) untuk mendapatkan variasi data yang kaya. Waktu Penelitian: Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai dari Mei 2026 hingga Juni 2026, meliputi tahap pra-penelitian, pengumpulan data di lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang benar-benar memahami dan mengalami langsung fenomena yang diteliti. Total informan dalam penelitian ini disederhanakan menjadi 8 orang aktor kunci yaitu: Ketua Tim PKH Kabupaten Pasaman Barat 1 orang, Pendamping Sosial PKH 3 orang dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 4 orang.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan landasan bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai strategi pendamping PKH di Kabupaten Pasaman Barat. Penggalan data dilakukan secara mendalam untuk menangkap realitas empiris di lapangan serta menyinkronkannya dengan kebijakan normatif yang berlaku. Menurut (Lofland & Lofland, 1995) dalam (Moleong, 2017), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan berupa dokumen dan lainnya. Guna mencapai validitas informasi, peneliti membagi sumber data menjadi dua kategori utama sebagai berikut: 1) Data primer: wawancara semi-struktural mendalam, observasi partisipatif kegiatan pendampingan dan usaha KPM, dokumentasi (laporan pendamping, notulen P2K2, data KPM); 2) Data sekunder:

pedoman PKH (Kemensos), publikasi BPS Kabupaten Pasaman Barat, laporan evaluasi PKH nasional dan studi terdahulu.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar analisis. (Creswell & Poth, 2016) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data harus dilakukan melalui serangkaian prosedur yang berulang dan mendalam untuk membangun pemahaman yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*human instrument*) untuk mengamati secara langsung bagaimana strategi pendampingan dioperasikan di tengah keterbatasan modal dan pasar. Adapun teknik yang digunakan meliputi: 1) Wawancara semi-struktural dengan panduan berisi topik: strategi pendamping, praktik pemetaan aset, fasilitasi akses modal dan pasar, hambatan, dan rekomendasi; 2) Observasi lapangan pada sesi pembinaan, kegiatan produksi/olah usaha KPM, dan interaksi pasar; 3) Dokumentasi administrasi PKH, statistik BPS, dan arsip Dinas Sosial.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data kualitatif yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik Triangulasi yang terbagi menjadi dua jenis: 1) Triangulasi Sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam studi ini, data hasil wawancara dengan pendamping PKH akan disilangkan dengan pernyataan KPM, data dari Dinas Sosial, dan realitas di perbankan; 2) Triangulasi Teknik yaitu membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang berbeda pada objek yang sama. Peneliti mengecek kesesuaian antara apa yang dikatakan informan saat *wawancara*, dengan apa yang terlihat pada saat *observasi* di lapangan, serta apa yang tertulis di dalam *dokumentasi* laporan resmi.

Analisis data mengikuti prosedur (Huberman & Miles, 2002): (1) reduksi data (coding tematik), (2) penyajian data (matriks, narasi), dan (3) verifikasi/penarikan kesimpulan (triangulasi sumber dan teknik). Selain itu dilakukan analisis SWOT terstruktur berdasarkan temuan kualitatif untuk merumuskan strategi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program PKH (Program Bantuan Bersyarat = *Conditional Cash Transfer*)

Program bantuan bersyarat (CCT) seperti PKH secara teoritis bertujuan bukan hanya memberikan bantuan konsumsi temporal, tetapi juga memicu akumulasi manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan sehingga berdampak jangka panjang pada kapasitas produksi rumah tangga (Rawlings & Rubio, 2005). Di Indonesia, PKH diimplementasikan dengan mekanisme tunai bersyarat dan sesi pengembangan keluarga (P2K2) sebagai wahana edukasi dan pembinaan. Namun, temuan lapangan di Kabupaten

Pasaman Barat menunjukkan adanya *gap* yang signifikan antara desain normatif tersebut dengan realitas operasional.

Berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan P2K2 di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Pasaman, fokus pendamping masih tersita pada pemenuhan aspek kehadiran dan kelengkapan administrasi komponen (anak sekolah dan ibu hamil), sementara materi penguatan ekonomi belum tersampaikan secara aplikatif. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berikut: "Kalau pas pertemuan kelompok (P2K2) itu, kami lebih banyak dicatat absen, ditanya soal anak sekolah sama uangnya sudah cair atau belum. Ada diajarkan soal usaha, tapi cuma teori saja, kami bingung mulainya karena tidak ada modal dan tidak tahu caranya membuat keripik jagung yang tahan lama untuk dijual." (*Wawancara dengan Ibu Nur, KPM PKH Nagari Aua Kuniang, 12 Mei 2026*)

Evaluasi global CCT menunjukkan hasil yang bervariasi: perbaikan konsumsi dan akses layanan seringkali diikuti oleh tantangan pada aspek pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu penting mengkaji bagaimana komponen pelengkap seperti pendampingan dan pemanfaatan sumber daya lokal dapat memperkuat outcome program. Kajian ini merujuk pada kerangka *outputs* → *outcomes* → *impacts* dalam studi kebijakan sosial. (Rawlings & Rubio, 2005).

Teori pemberdayaan komunitas menekankan pentingnya mobilisasi aset lokal material, manusia, sosial sebagai basis pembangunan yang berkelanjutan (Chambers, 1997). Konsep *asset-based community development* menyarankan intervensi yang memanfaatkan kapasitas lokal ketimbang memaksakan model eksternal yang tidak kontekstual. Dalam konteks PKH, pemberdayaan berarti mengubah bantuan menjadi sarana investasi produktif melalui fasilitasi keterampilan, akses modal, dan pasar. Hingga kini literatur menekankan bahwa tanpa peta aset yang terstruktur dan strategi pasar, inisiatif usaha kecil berbasis rumah tangga sulit berkembang. Oleh karena itu peran pendamping sebagai agen peta aset dan fasilitator pasar menjadi sangat penting. (Chambers, 1997).

Dokumentasi peneliti terhadap kegiatan kelompok usaha KPM di Kecamatan Talamau memperlihatkan bahwa sisa hasil panen jagung yang melimpah hanya dijual mentah kepada tengkulak dengan harga rendah, bukannya diolah menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Pendamping sosial PKH berfungsi sebagai perantara antara kebijakan pusat dan kondisi lokal, melakukan verifikasi, pembinaan, dan fasilitasi layanan sosial (Munandar, 2019). Namun, peran sebagai agen pemeta aset dan fasilitator pasar ini terhambat oleh kompetensi teknis kewirausahaan pendamping yang minim. Seorang pendamping PKH mengungkapkan kendala tersebut: "Kami dituntut untuk mengarahkan KPM agar mandiri dan graduasi melalui pemanfaatan potensi lokal seperti sawit dan jagung di Pasaman Barat ini. Tapi jujur, kami sendiri tidak pernah mendapatkan pelatihan teknis cara mengolah komoditas itu atau cara menembus pasar digital. Akibatnya, bimbingan yang kami berikan ke KPM

hanya sebatas motivasi normatif agar mereka rajin menabung." (*Wawancara dengan Sdri Nova, Pendamping PKH Kecamatan Talamau, 15 Mei 2026*)

Kondisi ini memperkuat analisis empiris di beberapa daerah Indonesia yang menunjukkan peran pendamping baru sebatas meningkatkan kepatuhan KPM terhadap syarat program (seperti kehadiran di faskes dan fasdik), namun beban kerja tinggi, variasi kompetensi, serta insentif yang tidak memadai memengaruhi efektivitas pendampingan dalam aspek pemberdayaan ekonomi (Munandar, 2019).

Pemikiran normatif menyatakan tujuan PKH sebagai intervensi yang mengarah pada kemandirian KPM, namun di lapangan seringkali memperlihatkan gap yang signifikan akibat kendala operasional dan sosial. Gap ini muncul baik pada level individu (konsumtif vs produktif), institusional (koordinasi antar sektor), maupun struktural (akses pasar dan modal). Literatur implementasi kebijakan menekankan pentingnya perhatian pada gap tersebut agar desain program tidak hanya normatif tetapi juga praktis. Dalam kasus PKH, pendamping berperan sebagai agen yang dapat meminimalkan gap dengan intervensi berbasis aset lokal (Garini, 2023).

Di Kabupaten Pasaman Barat, gap struktural dan institusional terlihat jelas dari tidak adanya sinkronisasi program antara Dinas Sosial (yang membawahi pendamping PKH) dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Berdasarkan dokumentasi proposal kelompok KPM di Kecamatan Luhak Nan Duo, inisiatif pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pengolahan lidi sawit menjadi kerajinan tangan seringkali kandas karena tidak mendapatkan kuota pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja dari dinas terkait. Kebijakan daerah belum menempatkan data KPM PKH sebagai prioritas utama dalam program pemberdayaan ekonomi daerah.

Strategi penguatan kapasitas pendamping literatur menyarankan beberapa strategi penguatan kapasitas untuk pendamping, antara lain: pelatihan teknis kewirausahaan, pengurangan rasio KPM-per-pendamping, insentif berbasis kinerja, dan pengembangan jejaring kemitraan dengan sektor perbankan mikro serta LSM. Strategi ini bertujuan meningkatkan kemampuan pendamping menjadi fasilitator pasar dan mentor teknis, bukan hanya pelapor administrasi. Studi kasus memperlihatkan intervensi pembinaan terstruktur meningkatkan outcome produktif KPM apabila dilengkapi akses modal. Penelitian ini akan mengevaluasi implementasi strategi-strategi tersebut di Pasaman Barat berdasarkan praktik lokal (Rahmawati & Kisworo, 2017).

Sejumlah penelitian lokal menunjukkan inisiatif sukses ketika pendamping mampu mengintegrasikan program PKH dengan pelatihan teknis, kelompok usaha bersama, serta fasilitasi akses pasar lokal. Namun ada pula yang melaporkan kegagalan ketika intervensi tidak mempertimbangkan karakteristik pasar dan preferensi konsumsi lokal. Sintesis literatur ini memberikan bukti bahwa konteks lokal menentukan keberhasilan transformasi aset menjadi usaha produktif. Oleh karena itu studi kontekstual di Pasaman Barat penting untuk menguji generalisasi temuan sebelumnya.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (Ancaman) dalam Strategi Pendampingan

Kekuatan (Strengths)

a. Kedekatan Emosional dan Geografis:

Kekuatan utama strategi pendampingan di Pasaman Barat terletak pada posisi pendamping sebagai *street-level bureaucrats* yang memiliki kedekatan emosional dan geografis dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping berfungsi sebagai ujung tombak yang memahami karakteristik sosial budaya masyarakat lokal secara mendalam. (Lipsky, 2010) menjelaskan bahwa diskresi yang dimiliki petugas lapangan memungkinkan mereka menyesuaikan instruksi kaku dari pusat menjadi tindakan yang lebih kontekstual di tingkat nagari. Kedekatan ini mempermudah proses persuasi dalam mengubah pola pikir KPM dari konsumtif menjadi produktif.

b. Instrumen Edukasi Struktural (P2K2)

Melalui instrumen formal P2K2, pendamping sebenarnya memiliki otoritas struktural untuk mentransformasi perilaku keluarga miskin secara sistematis (Indonesia, 2018). Secara kuantitatif, keberadaan 65 tenaga pendamping di Kabupaten Pasaman Barat merupakan aset SDM yang besar jika dikelola dengan manajemen strategis yang tepat untuk melakukan pemetaan potensi internal organisasi dan wilayah (DAVID, 2014).

Selain itu, keberadaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* menjadi instrumen edukasi yang sangat kuat secara struktural. Melalui forum ini, pendamping memiliki otoritas formal untuk menyampaikan materi kewirausahaan dan pengelolaan keuangan secara rutin setiap bulan. Menurut (Indonesia, 2018), P2K2 dirancang sebagai wahana transformasi perilaku yang sistematis bagi keluarga miskin. Strategi ini memungkinkan adanya transfer pengetahuan yang konsisten mengenai pentingnya investasi sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi.

c. Kuantitas Personel sebagai Aset Strategis:

Secara kuantitatif, ketersediaan 65 tenaga pendamping di Kabupaten Pasaman Barat merupakan aset sumber daya manusia yang besar jika dikelola dengan manajemen strategis yang tepat. (DAVID, 2014) menekankan bahwa audit internal terhadap aset manusia adalah langkah awal untuk menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Dengan jumlah personel tersebut, pemerintah daerah memiliki jaringan pengawasan hingga ke pelosok desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kekuatan personel ini menjadi modal dasar dalam melakukan pemetaan potensi sumber daya lokal secara partisipatif.

Kelemahan (Weaknesses)

a. Tingginya Rasio Beban Kerja

Kelemahan yang paling menonjol adalah tingginya rasio beban kerja pendamping yang tidak merata di beberapa kecamatan seperti Gunung Tuleh dan Talamau. Ketika satu pendamping harus mengawal hingga 350 KPM, fokus kerja cenderung bergeser pada pemenuhan kewajiban administratif dan verifikasi data semata. Kondisi ini menyebabkan fungsi pendamping sebagai motivator dan fasilitator ekonomi menjadi terabaikan karena keterbatasan waktu dan energi. (EDWARDS III, 2000) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas merupakan penghambat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Minimnya Kompetensi teknis Kewirausahaan

Rendahnya kapasitas teknis pendamping dalam bidang kewirausahaan dan analisis pasar juga menjadi kelemahan internal yang signifikan. Sebagian besar pendamping memiliki latar belakang pendidikan ilmu sosial, namun kurang dibekali pelatihan teknis mengenai pengolahan produk pertanian atau manajemen usaha mikro. (Taufiqurokhman et al., 2023) berpendapat bahwa efektivitas strategi sektor publik sangat bergantung pada kompetensi pelaksana dalam mengelola peluang yang ada. Tanpa keahlian teknis, arahan pendamping kepada KPM untuk memanfaatkan potensi jagung atau kelapa sawit sering kali hanya bersifat normatif tanpa bimbingan praktis.

c. Keterbatasan Wewenang Finansial:

Selain itu, keterbatasan wewenang formal pendamping dalam mengakses sumber daya finansial di luar bansos menjadi kendala dalam strategi pemberdayaan. Pendamping sering kali hanya bisa memberikan saran tanpa mampu menjembatani kebutuhan modal secara langsung karena tidak adanya alokasi dana pendampingan usaha. Hal ini menciptakan ketergantungan KPM pada dana bansos sebagai satu-satunya sumber likuiditas rumah tangga mereka. Kondisi ini memperlemah posisi pendamping sebagai agen perubahan ekonomi karena tidak memiliki instrumen intervensi modal yang konkret.

Peluang (Opportunities)

a. Kelimpahan Sumber Daya Alam Lokal

Peluang besar bagi strategi pendampingan muncul dari melimpahnya sumber daya alam lokal di Pasaman Barat, seperti komoditas kelapa sawit, jagung, dan kopi. Pemanfaatan sumber daya lokal (*local resource mobilization*) dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). (Chambers, 1997) menekankan bahwa pembangunan berbasis aset lokal jauh lebih berkelanjutan daripada mengandalkan intervensi dari luar. Pendamping dapat memanfaatkan potensi ini untuk

menciptakan *multiplier effect* bagi pendapatan rumah tangga KPM melalui hilirisasi produk pertanian sederhana.

b. Integrasi Kebijakan Pusat (Program PENA)

Peluang ini semakin diperkuat oleh kebijakan pusat yang mengintegrasikan PKH dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Integrasi perlindungan sosial dengan skema inklusi produktif seperti PENA merupakan arah masa depan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia (Yuda & Pholpark, 2022). Di Pasaman Barat, integrasi ini berpotensi memberikan bantuan peralatan usaha konkret bagi KPM yang dinilai siap graduasi mandiri setelah mendapatkan pendampingan motivasi.

c. Digitalisasi Ekonomi dan Akses Pasar

Adanya tren digitalisasi ekonomi dan menjamurnya *marketplace* memberikan peluang bagi pendamping untuk memfasilitasi akses pasar bagi produk KPM. Pendamping dapat berperan sebagai penghubung antara kelompok usaha KPM dengan platform digital atau BUMDes setempat untuk memasarkan hasil olahan lokal. Menurut (Bank, 2020), akses terhadap pasar yang lebih luas merupakan faktor kunci dalam mempercepat graduasi keluarga miskin dari jerat kemiskinan. Peluang ini sangat terbuka lebar mengingat infrastruktur internet yang mulai menjangkau wilayah pedesaan di Pasaman Barat.

Tantangan/Ancaman (Threats)

a. Pola Perilaku Konsumtif dan Ketergantungan

Perilaku konsumtif KPM yang sudah mengakar akibat ketergantungan jangka panjang pada bantuan tunai. Adanya persepsi bahwa bantuan PKH adalah "uang kaget" untuk kebutuhan konsumsi harian mempersulit pendamping dalam mengarahkan dana tersebut sebagai modal usaha. (Shepherd et al., 2011) memperingatkan tentang risiko sindrom ketergantungan yang dapat mematikan inisiatif mandiri penerima manfaat. Jika pola konsumtif ini tidak diputus melalui pendampingan yang intensif, bantuan PKH hanya akan menjadi solusi jangka pendek tanpa dampak struktural. Realitas ini tergambar jelas dari kutipan wawancara dengan salah satu Koordinator Tim Kabupaten (Katim) PKH Pasaman Barat:

"Tantangan terberat kami adalah mengubah *mindset* KPM. Kebanyakan dari mereka menganggap PKH ini adalah hak paten seumur hidup dan uangnya langsung habis untuk kebutuhan konsumsi harian, baju baru, atau *gadget* anak, bukan ditabung untuk modal. Ketika diajak berwirausaha, mereka takut bantuan mereka dihentikan." (Wawancara dengan Ibu Risanti Kumala Dewi, ketua Tim PKH Kabupaten Pasaman Barat, 18 Juni 2026)

b. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektoral

Rendahnya koordinasi lintas sektoral di tingkat kabupaten menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan strategi pemberdayaan pendamping. Sering kali dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan bekerja secara parsial tanpa melibatkan data KPM PKH sebagai sasaran prioritas. (Sabatier & Mazmanian, 1983) berargumen bahwa kegagalan implementasi sering kali disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi antara instansi yang memegang otoritas berbeda. Tanpa dukungan kebijakan daerah yang padu, inisiatif pendamping di lapangan akan menemui jalan buntu saat berhadapan dengan masalah perizinan dan modal.

c. Fluktuasi Harga Komoditas

Ketidakpastian harga komoditas pertanian lokal seperti jagung dan sawit juga mengancam stabilitas usaha yang dibangun oleh KPM. Mengingat sebagian besar ekonomi Pasaman Barat bergantung pada sektor primer, fluktuasi harga global dapat seketika meruntuhkan usaha produktif yang baru dirintis. (Sen, 2014) dalam teori kapabilitas menjelaskan bahwa kerentanan terhadap guncangan ekonomi eksternal adalah ciri utama masyarakat miskin. Pendamping menghadapi tantangan besar dalam memberikan literasi risiko agar KPM mampu bertahan di tengah ketidakpastian harga pasar.

d. Hambatan Infrastruktur Geografis

Hambatan infrastruktur jalan dan akses transportasi di beberapa wilayah terpencil Pasaman Barat juga mempersulit mobilisasi produk dan distribusi bantuan. Biaya logistik yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk lokal yang dihasilkan oleh KPM, sehingga usaha mereka sulit berkembang. (Hogwood & Gunn, 1984) menyatakan bahwa hambatan fisik dan geografis adalah variabel luar yang sering kali diabaikan namun sangat menentukan keberhasilan eksekusi kebijakan. Tantangan infrastruktur ini menuntut pendamping untuk lebih kreatif dalam merancang strategi pemasaran yang paling efisien bagi KPM.

e. Ketidakakuratan Data Kemiskinan (Inclusion dan Exclusion Error)

Ketidakakuratan data memicu konflik horizontal di tingkat nagari yang dapat menggerus modal sosial pendamping. Berdasarkan aturan hukum terbaru, yakni Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas data adalah jantung dari keberhasilan program jaring pengaman sosial untuk bantuan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Indonesia, 2018). Konflik akibat ketidakadilan data ini menciptakan resistensi sosial yang menghambat partisipasi KPM dalam program pemberdayaan.

Kajian Relevan

Kajian pertama oleh (Nandini, 2022) menyoroti peran pendamping PKH di Kabupaten Sleman yang memiliki kesamaan dengan Pasaman Barat dalam hal fungsi pendamping sebagai fasilitator perubahan perilaku melalui P2K2. Namun, perbedaan mendasar terletak pada ketersediaan ekosistem pendukung, di mana di wilayah perkotaan akses pasar lebih terbuka dibandingkan tantangan geografis di Pasaman Barat. Nandini menekankan bahwa beban kerja pendamping yang tinggi menjadi penghambat utama efektivitas pendampingan ekonomi bagi KPM. Hal ini memperkuat premis penelitian Anda bahwa rasio pendamping di Pasaman Barat yang mencapai 1:350 di beberapa kecamatan merupakan kelemahan struktural yang serius. Temuan ini menggarisbawahi perlunya restrukturisasi beban kerja untuk optimalisasi pemberdayaan.

Kajian kedua oleh (Munandar, 2019) mengevaluasi efektivitas PKH dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan fokus pada peningkatan aset manusia (pendidikan dan kesehatan). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanpa sinergi dengan program penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, KPM cenderung kembali ke garis kemiskinan setelah bantuan dihentikan. Berbeda dengan Pasaman Barat yang kaya akan komoditas jagung dan sawit, penelitian Munandar menemukan bahwa tantangan di daerah pesisir lebih pada ketergantungan musiman nelayan. Persamaannya adalah kedua wilayah sama-sama menghadapi pola konsumtif KPM yang menghabiskan bantuan untuk kebutuhan non-produktif. Oleh karena itu, strategi pendampingan harus diarahkan pada literasi keuangan yang lebih masif.

Kajian ketiga dari (Garini, 2023) secara khusus membedah tentang pemanfaatan modal sosial dan sumber daya lokal dalam strategi graduasi KPM. Penelitian ini memberikan perspektif penting bagi Pasaman Barat bahwa keberhasilan strategi pendampingan sangat bergantung pada kemampuan pendamping dalam memetakan aset komunitas. Garini menemukan bahwa kelompok usaha bersama (KUBE) yang sukses adalah yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi pengolahan pangan. Hal ini relevan dengan peluang di Pasaman Barat yang memiliki potensi pengolahan pangan tradisional namun terkendala oleh kemasan dan akses pemasaran digital. Penelitian tersebut menyarankan agar pendamping diberikan pelatihan teknis manajerial untuk menjembatani gap kemampuan KPM.

Kajian keempat oleh (Yuda & Pholpark, 2022) memberikan analisis makro mengenai lanskap perlindungan sosial di Indonesia dan tantangan integrasi kebijakan. Mereka berpendapat bahwa rendahnya koordinasi lintas lembaga merupakan penyakit kronis dalam implementasi PKH di berbagai daerah, yang juga terjadi di Pasaman Barat. Perbandingannya terletak pada bagaimana kebijakan daerah merespons program nasional; daerah dengan komitmen anggaran tinggi cenderung lebih sukses melakukan pemberdayaan. Tantangan yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah minimnya data terpadu yang dapat diakses oleh pihak perbankan dan swasta untuk penyaluran modal. Hal ini

sangat sinkron dengan masalah rendahnya koordinasi instansi yang Anda temukan di lapangan.

Kajian kelima dari (Rahmawati & Kisworo, 2017) memfokuskan pada strategi penguatan kapasitas pendamping sosial sebagai kunci keberhasilan program CCT. Mereka menemukan bahwa insentif berbasis kinerja dan pelatihan kewirausahaan terstruktur bagi pendamping secara signifikan meningkatkan jumlah KPM yang mampu berwirausaha secara mandiri. Di Pasaman Barat, strategi ini dapat menjadi solusi atas ancaman rendahnya kompetensi pendamping dalam membimbing KPM mengolah komoditas pertanian. Persamaan temuan mereka adalah pendamping seringkali merasa "terjebak" dalam tugas administratif sehingga fungsi edukasi ekonomi terpinggirkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kuat untuk mengubah paradigma kerja pendamping dari sekadar penyalur bantuan menjadi mentor bisnis lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga temuan utama terkait kesenjangan (*gap*) antara desain normatif Kebijakan PKH dengan realitas operasional pendampingan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Pasaman Barat:

1. Pergeseran Peran Pendamping Akibat Beban Administratif: Upaya pendamping PKH dalam mendorong kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum berjalan optimal. Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang seharusnya menjadi wadah transformasi perilaku ekonomi, di lapangan masih didominasi oleh pemenuhan aspek kehadiran dan kelengkapan administrasi komponen. Hal ini dipicu oleh tingginya rasio beban kerja (mencapai 1:350 KPM) dan minimnya kompetensi teknis kewirausahaan pendamping.
2. Kandasnya Hilirisasi Sumber Daya Lokal Akibat *Institutional Gap*: Kabupaten Pasaman Barat memiliki kelimpahan komoditas lokal (seperti jagung, kelapa sawit, dan kopi) yang berpotensi besar menjadi basis pemberdayaan ekonomi. Namun, pemanfaatan aset lokal ini terhambat oleh lemahnya sinkronisasi program lintas sektoral antara Dinas Sosial dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Akibatnya, inisiatif produktif KPM—seperti pengolahan sisa hasil panen jagung atau kerajinan lidi sawit—sering kali mandek pada level motivasi normatif tanpa adanya keberlanjutan intervensi modal, pelatihan teknis, dan akses pasar.
3. Ancaman Struktural dan Validitas Data: Strategi pemberdayaan ekonomi menghadapi tantangan berat berupa pola perilaku konsumtif KPM yang akut akibat sindrom ketergantungan bantuan.

Daftar Pustaka

- Bank, W. (2010). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. World Bank.
- Bank, W. (2020). *Indonesia Social Assistance Competitiveness Study*. World Bank Group.
- Barat, B. P. S. K. P. (2024). *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2024*. BPS Pasaman Barat.
- Barney, J. B. (1997). Gaining and sustaining competitive advantage. (No Title).
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?: putting the first last*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- DAVID, F. D. (2014). *STRATEGIC MANAGEMENT: A Competitive Advantage Approach, Concepts & Cases Olp with Etext,... Global Edition*. Pearson Education Limited.
- EDWARDS III, G. C. (2000). Building coalitions. *Presidential Studies Quarterly*, 30(1), 47–78.
- Garini, R. (2023). Pemanfaatan Sumber Daya Lokal sebagai Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1>
- Grindle, M. S. (1989). *The new political economy positive economics and negative politics* (Vol. 304). World Bank Publications.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). Policy analysis for the real world. (No Title).
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Indonesia, K. S. R. (2018). *Laporan Tahunan Program Keluarga Harapan*. Kemensos RI.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part II. *Accounting Horizons*, 15(2), 147–160.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation.
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (1995). Developing analysis. *Analyzing Social Setting*, 183–203.
-

Mansur, M., Nur, M. T., Fasiha, F., & Darwis, M. I. (2024). Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Al Maslahah Al Mursalah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 123–136.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*/Lexy J. Moleong.

Munandar, A. (2019). Fungsi Pendamping Sosial sebagai Fasilitator Perubahan Perilaku dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.21009/jkp.052.03>

Nandini, R. (2022). Kapasitas dan Beban Kerja Pendamping Sosial dalam Pelayanan Publik. *Sosio Konsepsia*, 11(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.2845>

Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 161–169.

Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. (2005). Evaluating the impact of conditional cash transfer programs. *The World Bank Research Observer*, 20(1), 29–55.

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). The prospects for effective implementation of regulatory policy. In *Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative* (pp. 1–26). Springer.

Schultz, T. P. (2004). School subsidies for the poor: evaluating the Mexican Progresa poverty program. *Journal of Development Economics*, 74(1), 199–250.

Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). *The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change*, 525.

Shepherd, A., Wadugodapitiya, D., & Evans, A. (2011). Social protection and the 'dependency syndrome.' *CPRC Policy Brief*, 22.

Sudarmanto, E., Aulia, T. Z., Siregar, I. G., Erdawati, L., Isrok, I., Saputra, M. W., & Purnamasari, Y. F. (2024). Go Green: Memberdayakan Masyarakat Rawa Buntu Serpong Dengan Menanam Sayuran dan Rempah-rempah. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat*, 1(4), 31–40.

Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Murod, M., Izzatusholekha, I., Andriansyah, A., & Samudera, A. A. (2023). Kebijakan pemerintah memajukan kualitas sumber daya manusia unggul. *Swatantra*, 21(2), 189–205.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Yuda, T. K., & Pholpark, A. (2022). Healthcare expansion in Indonesia and Thailand: a causal mechanism and its implications for welfare regimes. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 38(2), 111–129.
